

PUBLIC SECTOR ACCOUNTING REFORM: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Mariana¹, Diana², Muhammad Arifai³, Miftahul Jannah⁴

Politeknik Negeri Lhokseumawe

mariana@pnl.ac.id¹, dianahasan75@yahoo.co.id², arifai_m@pnl.ac.id³,
miftahuljannah@pnl.ac.id⁴

Abstract

This study aims to identify and categorize key findings in the literature related to public sector accounting reform, analyze the challenges and impacts of implementing accrual-based accounting, and formulate research directions and policy recommendations. The method employed is a Systematic Literature Review (SLR) of 10 national and international scholarly articles published between 2018 and 2023. The findings reveal that the implementation of accrual accounting in the public sector faces various challenges, including institutional barriers, bureaucratic resistance, dual reporting burdens, and a lack of digital infrastructure. Nevertheless, this reform also offers potential improvements in transparency, accountability, and efficiency in public financial management. This review recommends strengthening human resource capacity, integrating information systems, a phased transition approach, and harmonizing central and regional policies to support effective and sustainable accrual implementation.

Keywords: Public Sector Accounting, Accrual Transparency, Accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan temuan utama dalam literatur terkait reformasi akuntansi sektor publik, menganalisis tantangan dan dampak implementasi akuntansi berbasis akrual, serta merumuskan arah penelitian dan rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 10 artikel ilmiah nasional dan internasional yang terbit antara tahun 2018 hingga 2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi akrual di sektor publik menghadapi berbagai tantangan seperti hambatan kelembagaan, resistensi birokrasi, beban pelaporan ganda, dan kurangnya infrastruktur digital. Meskipun demikian, reformasi ini juga membawa potensi perbaikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Kajian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi, fase transisi yang bertahap, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung implementasi akrual yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Akrual Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Reformasi akuntansi sektor publik merupakan respons terhadap tuntutan global untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu pilar utama reformasi ini adalah adopsi akuntansi berbasis akrual yang secara luas dipandang mampu menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif dan relevan dibandingkan pendekatan kas (Harun et al., 2015; Rajin et al., 2019). Di tengah semakin kompleksnya pengelolaan keuangan publik, adopsi akrual menjadi simbol modernisasi dalam sistem akuntansi sektor publik, yang juga bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pengambilan keputusan pemerintah (Muhtar, 2022; Mardiyanto, 2022).

Namun demikian, penerapan akuntansi akrual tidak selalu berjalan mulus. Beberapa studi menunjukkan bahwa adopsi sistem ini sering kali menghadapi resistensi institusional, ketidaksiapan sumber daya manusia, dan tidak selarasnya konteks sosial-politik dengan prinsip-prinsip standar internasional seperti IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) (Adhikari et al., 2019; Polzer et al., 2019). Bahkan, sebagian literatur menggarisbawahi bahwa penerapan akuntansi akrual justru dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang belum cukup dibahas dalam kajian akademik, seperti disorientasi kebijakan, ketidakefisienan implementasi, hingga hilangnya fokus terhadap tujuan pelayanan publik (Bonollo, 2022; Brito & Jorge, 2020).

Faktor eksternal seperti tekanan lembaga internasional dan harmonisasi global turut mempercepat adopsi akuntansi akrual di negara-negara berkembang. Namun, efektivitas reformasi tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana sistem baru dapat disesuaikan dengan kondisi lokal (Brusca & Ocaña, 2016; Schmidhuber et al., 2020). Penelitian Mir et al. (2018) di Indonesia, misalnya, menemukan bahwa penerapan sistem pelaporan ganda (dual reporting system) di pemerintah daerah justru menimbulkan beban administratif yang mengganggu efisiensi birokrasi.

Di sisi lain, literatur domestik memperkuat temuan bahwa reformasi akuntansi sektor publik berpotensi mendukung pencegahan kecurangan dan memperbaiki kualitas laporan keuangan, khususnya ketika didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai dan penggunaan teknologi informasi (Damayanti, 2020; Purnama & Puspasari, 2019; Manik, 2019). Penelitian Putri & Retnosari (2023) menegaskan bahwa akuntansi sektor publik yang transparan merupakan instrumen penting dalam membangun integritas keuangan negara di era digital.

Meskipun banyak studi telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait pemetaan sistematis atas tantangan, dampak, serta dinamika institusional yang menyertai reformasi akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks negara berkembang. Oleh karena itu, kajian ini disusun dalam bentuk systematic literature review (SLR) untuk mengidentifikasi dan mensintesis secara kritis tren-temuan, kelemahan metodologis, serta agenda riset masa depan dalam reformasi akuntansi sektor publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai kompleksitas reformasi serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan temuan utama dalam literatur tentang reformasi akuntansi sektor public; menganalisis tantangan dan dampak implementasi akuntansi berbasis akrual di sektor public dan merumuskan arah penelitian dan rekomendasi kebijakan berbasis kajian sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara sistematis berbagai literatur terkait reformasi akuntansi sektor public (Adira et al., 2024; Camsana et al., 2024; Fitri et al., 2024; Imelda et al., 2024). Proses dimulai dengan pencarian artikel melalui basis data seperti Scopus, Google Scholar, dan

Garuda menggunakan kata kunci yang relevan (Pasaribu et al., 2024; Fikra et al., 2025; Maulidi et al., 2025; Syahputri et al., 2025; Zahrani et al., 2025).

Selanjutnya, artikel diseleksi berdasarkan topik, kualitas jurnal, serta kesesuaian dengan fokus kajian (Ramadana et al., 2023; Mariana and Liza, 2024; Mariana, Ramadana and Rahmania, 2024). Artikel yang terpilih dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi isu utama, metode yang digunakan, serta temuan penting dari masing-masing penelitian (Mariana, Ramadana and Rahmانيar, 2024; Maulena, Zulkarnain and Mariana, 2024; Firdaus et al., 2025; Geubrina, Zulkarnain and Mariana, 2025; Kusumo and Mariana, 2025; Rinayanti et al., 2025). Hasil kajian kemudian disintesis untuk merumuskan tren, tantangan, dan rekomendasi dalam reformasi akuntansi sektor publik.

LANDASAN TEORI

Reformasi akuntansi sektor publik merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi modern, termasuk akuntansi berbasis akrual dan penerapan sistem informasi akuntansi. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa reformasi ini tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi tantangan yang signifikan.

Harun et al. (2015) mengungkapkan bahwa aspirasi reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia seringkali terlalu ambisius, sehingga terjadi kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi nyata di lapangan. Dalam konteks internasional, Bonollo (2022) menyoroti bahwa penerapan akrual justru dapat menimbulkan dampak negatif, terutama terkait dengan biaya tinggi, kompleksitas teknis, dan minimnya bukti manfaat nyata terhadap pengambilan keputusan.

Studi Adhikari dan Gårseth-Nesbakk (2016) serta Rajin et al. (2019) menekankan tantangan implementasi akrual, khususnya di negara berkembang dan OECD, yang dihadapkan pada resistensi kelembagaan dan keterbatasan kapasitas teknis serta infrastruktur pendukung. Senada dengan itu, Polzer et al. (2021) menjelaskan bahwa adopsi IPSAS di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh tekanan politik dan kesiapan teknis suatu negara.

Dalam praktik di Indonesia, Mir et al. (2018) menunjukkan bahwa keberadaan sistem pelaporan ganda antara akuntansi berbasis kas dan akrual justru menimbulkan kebingungan, sehingga dibutuhkan harmonisasi sistem pelaporan. Hal ini diperkuat oleh Damayanti (2020) yang menilai bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum efektif menyebabkan kesalahan pencatatan dan potensi fraud.

Dalam konteks digitalisasi, Putri dan Retnosari (2023) mendorong pentingnya adaptasi sistem akuntansi sektor publik terhadap teknologi digital, tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk memperkuat integritas dalam pencegahan fraud. Mardiyanto (2022) menambahkan bahwa lemahnya kontrol dan akuntabilitas merupakan akar utama kecurangan di pemerintah daerah.

Sisi teknis implementasi juga diperkuat oleh temuan Gustyari et al. (2022), yang menunjukkan bahwa keberhasilan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sangat bergantung pada kemudahan penggunaan dan pelatihan yang memadai.

Lebih lanjut, studi yang berfokus pada motivasi dan perilaku auditor seperti Mariana dan Rahmانيar (2022), serta Munawarah dan Diantimala (2016), menjelaskan bahwa integritas auditor dan tekanan waktu dapat memengaruhi kualitas audit dan kinerja akuntabilitas. Hal ini menjadi krusial dalam mendukung reformasi akuntansi sektor publik yang kredibel. Mariana et al. (2024) turut memperkuat bahwa etika audit dan motivasi memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan strategis auditor internal.

Dari perspektif penganggaran, Liza dan Mariana (2023) menjelaskan bahwa praktik *budget ratcheting* dapat memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dan belanja modal, yang menjadi bagian penting dari sistem akuntansi berbasis kinerja. Di sisi lain, Ramadana et al. (2023) menyoroti bahwa determinan kinerja keuangan daerah sangat berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip akuntansi dan transparansi fiskal.

Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa reformasi akuntansi sektor publik bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga merupakan persoalan kelembagaan, budaya organisasi, integritas aparatur, dan kesiapan infrastruktur digital. Keberhasilan reformasi sangat bergantung pada kolaborasi berbagai aktor, penguatan kapasitas kelembagaan, dan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas jangka panjang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	Harun et al. (2015)	Reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia	Aspirasi dialogis reformasi terlalu ambisius; terjadi kesenjangan antara konsep dan implementasi.
2	Bonollo (2022)	Dampak negatif adopsi akuntansi akrual	Biaya tinggi, kompleksitas, dan minimnya bukti manfaat akrual secara nyata.
3	Adhikari & Gårseth-Nesbakk (2016)	Implementasi akrual di negara OECD	Tantangan teknis dan manajerial signifikan; resistensi institusional tinggi.
4	Rajin et al. (2019)	Manajemen keuangan publik dan akrual di negara berkembang	Akrual sulit diadopsi tanpa infrastruktur dan kapasitas kelembagaan memadai.
5	Putri & Retnosari (2023)	Pencegahan fraud di era digital	Akuntansi sektor publik perlu adaptasi digital untuk penguatan integritas.
6	Mardiyanto (2022)	Fraud pada pemerintah daerah	Faktor penyebab kecurangan berasal dari lemahnya kontrol dan akuntabilitas.

No	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama
7	Mir et al. (2018)	Sistem pelaporan ganda di Indonesia	Pelaporan ganda menyebabkan kebingungan, perlu harmonisasi sistem.
8	Polzer et al. (2021)	Adopsi IPSAS di negara berkembang	Adopsi tergantung pada tekanan politik dan kapasitas teknis negara.
9	Damayanti (2020)	SPI pada sistem akuntansi pemerintah	SPI belum efektif dalam mencegah kesalahan pencatatan dan fraud.
10	Gustyari et al. (2022)	Kesuksesan SIMDA	SIMDA efektif jika user-friendly dan didukung pelatihan.

Mengidentifikasi dan Mengelompokkan Temuan Utama dalam Literatur

Hasil penelaahan sistematis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya pendukung. Beberapa tema utama yang konsisten muncul dalam berbagai studi adalah tantangan kelembagaan, biaya dan kompleksitas implementasi akrual, isu fraud serta pengendalian internal, dan peran digitalisasi dalam sistem informasi keuangan pemerintah.

Pertama, tantangan kelembagaan menjadi hambatan mendasar dalam reformasi akuntansi sektor publik. Harun et al. (2015) dan Rajin et al. (2019) menyoroti adanya kesenjangan antara konsep reformasi dengan kapasitas institusional yang tersedia, termasuk lemahnya komitmen politik dan resistensi dari aparatur birokrasi terhadap perubahan. Kedua, literatur juga menegaskan bahwa adopsi akuntansi berbasis akrual menimbulkan kompleksitas administratif dan teknis yang tinggi. Bonollo (2022) dan Adhikari & Gårseth-Nesbakk (2016) menunjukkan bahwa dalam konteks negara berkembang dan bahkan negara maju, akuntansi akrual membutuhkan biaya besar dan sistem informasi akuntansi yang canggih, serta pemahaman konseptual yang belum merata di kalangan pelaksana.

Selain itu, permasalahan fraud dan lemahnya sistem pengendalian internal masih menjadi isu krusial dalam tata kelola keuangan sektor publik. Mardiyanto (2022) mengungkapkan bahwa kecurangan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah banyak dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengendalian, sedangkan Damayanti (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan belum mampu secara optimal mencegah praktik fraud. Terakhir, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem akuntansi pemerintah juga menjadi tema sentral dalam literatur. Penelitian oleh Putri & Retnosari (2023) dan Gustyari et al. (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi, seperti penggunaan SIMDA, memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada pelatihan dan kesiapan pengguna sistem.

Menganalisis Tantangan dan Dampak Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

Implementasi akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik menghadapi berbagai tantangan teknis dan institusional yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam melakukan penilaian aset tetap, pengakuan kewajiban jangka panjang, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akrual (Bonollo, 2022; Adhikari et al., 2016). Di samping itu, resistensi dari birokrasi, terutama pada level operasional, menjadi hambatan signifikan dalam proses transisi. Mir et al. (2018) dan Harun et al. (2015) mengidentifikasi bahwa pelaporan ganda—yang terjadi karena sistem lama masih berjalan bersamaan dengan sistem baru—menimbulkan beban administrasi tambahan dan kebingungan dalam pelaporan.

Namun demikian, jika diimplementasikan dengan dukungan sistem yang memadai, akuntansi berbasis akrual berpotensi membawa dampak positif, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditunjukkan oleh Putri & Retnosari (2023) yang menekankan pentingnya dukungan digital dan pelatihan SDM dalam menunjang efektivitas penerapan sistem ini. Sebaliknya, tanpa pendampingan teknis yang memadai dan pelatihan yang intensif, adopsi akrual justru dapat menimbulkan peningkatan beban kerja administratif dan risiko miskomunikasi antara unit kerja (Polzer et al., 2021), yang berujung pada ketidakefektifan pelaporan dan pengambilan keputusan.

Merumuskan Arah Penelitian dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat beberapa arah strategis yang dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan. Pertama, eksplorasi terhadap efektivitas akuntansi berbasis akrual dalam mendukung proses pengambilan keputusan publik masih sangat diperlukan, khususnya dalam konteks pemerintah daerah. Kedua, studi komparatif antara daerah atau negara berkembang yang telah menerapkan IPSAS secara penuh dan sebagian dapat memberikan wawasan mendalam terkait hambatan, strategi adaptasi, dan faktor keberhasilan. Ketiga, isu integrasi antara sistem digital dengan peningkatan akuntabilitas fiskal daerah perlu mendapat perhatian lebih dalam kajian akademik untuk mendukung modernisasi manajemen keuangan publik.

Dari sisi kebijakan, hasil kajian ini mengarah pada beberapa rekomendasi penting. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas teknis sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta mendigitalisasi sistem akuntansi yang mendukung akuntansi akrual secara komprehensif. Selain itu, implementasi akrual perlu dilakukan secara bertahap dengan skema transisi yang disertai evaluasi berkala agar dapat mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan penyesuaian di setiap tahapan. Terakhir, reformasi akuntansi sektor publik akan lebih efektif apabila diiringi dengan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi maupun beban pelaporan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah sistematis terhadap berbagai literatur terkait reformasi akuntansi sektor publik, ditemukan bahwa proses transisi menuju akuntansi berbasis akrual menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Tema-tema utama yang muncul meliputi persoalan kesiapan kelembagaan, tingginya biaya dan kompleksitas implementasi, lemahnya pengendalian internal terhadap risiko fraud, serta kebutuhan adaptasi terhadap sistem digital.

Meski demikian, penerapan akuntansi berbasis akrual berpotensi memberikan dampak positif berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan sektor publik, asalkan didukung oleh sistem informasi yang handal dan penguatan kapasitas aparatur. Kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah serta perlunya model transisi yang terstruktur agar adopsi sistem akrual dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

SARAN

1. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi aparat pengelola keuangan agar mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi akrual secara efektif.
2. Investasi dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dan integrasi data digital menjadi prasyarat penting dalam mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual yang transparan dan real-time.
3. Diperlukan strategi bertahap dalam penerapan akuntansi akrual, disertai evaluasi berkala dan umpan balik dari satuan kerja pemerintah agar proses transisi dapat berlangsung adaptif dan minim hambatan.
4. Regulasi dan kebijakan akuntansi sektor publik perlu diselaraskan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan redundansi pelaporan atau konflik kebijakan dalam praktik implementasinya.

REFERENCES

- Adhikari, P., & Gårseth-Nesbakk, L. (2016). Implementing public sector accruals in OECD member states: major issues and challenges. *Accounting Forum*, 40(2), 125-142.
- Adhikari, P., Kuruppu, C., Ouda, H., Grossi, G., & Ambalangodage, D. (2019). Unintended consequences in implementing public sector accounting reforms in emerging economies: evidence from Egypt, Nepal and Sri Lanka. *International Review of Administrative Sciences*, 87(4), 870-887.
- Adira, S., et al. (2024). Peran Inspektorat Daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 78–90. <http://www.depkeu.com>

- Amalia, M. (2023). Enhancing accountability and transparency in the public sector: a comprehensive review of public sector accounting practices. *The Es Accounting and Finance*, 1(03), 160-168.
- Bonollo, E. (2022). Negative effects of the adoption of accrual accounting in the public sector: a systematic literature review and future prospects. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(6), 1–27.
- Brusca, I., & Ocaña, J. (2016). Adopting international public sector accounting standards: a challenge for modernizing and harmonizing public sector accounting. *International Review of Administrative Sciences*, 82(4), 724–744.
- Camsana, M. A. P., et al. (2024). Identifying errors and fraud in regional financial management: A literature review. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 9–17.
- Damayanti, I. (2020). Analisis sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi pemerintah. *KRISNA Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 95–102.
- Fikra, Z., et al. (2025). Meningkatkan efisiensi organisasi: Peran klasifikasi biaya dalam pengambilan keputusan. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 153–163.
- Firdaus, A., et al. (2025). Pengaruh GCG dan CSR dalam meningkatkan kinerja. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 666–677.
- Fitri, S. A., et al. (2024). Evaluasi kebijakan penganggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 52–59.
- Geubrina, A., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2025). Peran regulasi, kinerja keuangan, dan inovasi digital dalam memperkuat perbankan syariah di Aceh. *Journal of Islamic Management*, 5(1), 55–72.
- Gustyari, W., Priantana, R. D., & Saputra, D. S. (2022). Analisis kesuksesan SIMDA berdasarkan model DeLone dan McLean. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 56–65.
- Harun, H., Van-Peursem, K., & Eggleton, I. R. C. (2015). Indonesian public sector accounting reforms: dialogic aspirations a step too far? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(5), 706–738.
- Imelda, T., et al. (2024). Strategi pengelolaan keuangan negara: Implementasi akuntansi pemerintahan untuk efisiensi dan transparansi. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 60–66. <http://www.depkeu.com>
- Jesus, M., & Eirado, J. (2012). Relevance of accounting information to public sector accountability. *Tékhne*, 10(2), 87–98.
- Kusumo, Y. W., & Mariana, M. (2025). Manajemen komunikasi Islam: Prinsip, konsep, dan relevansi di era modern. *Journal of Islamic Management*, 5(1), 29–54.
- Laiza, L., & Mariana, M. (2023). Can budget ratcheting moderate the relationship between financial performance and capital expenditures? *Journal of Data Acquisition and Processing*, 38(3), 5472–5485. <https://doi.org/10.5281/zenodo.777718>

- Manik, T. (2019). Kualitas laporan keuangan dan pencegahan fraud di Provinsi Kepri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 3(1), 17–26.
- Mardiyanto, M. (2022). Determinan kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah di Indonesia: SLR. *JAIE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 7(2), 31–40.
- Mariana, M., & Liza, L. (2024). The implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) on net income of public companies in Indonesia. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 6(1), 70–85. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/j-iscan/article/view/2812>
- Mariana, M., & Rahmانيar, R. (2022). Pengaruh motivasi dan independensi auditor terhadap kinerja auditor. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.74>
- Mariana, M., Fitri, S. A., & Rahmania, R. (2024). Pengaruh etika audit dan motivasi terhadap keputusan strategis internal auditor. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2306–2313. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2179>
- Mariana, M., Ramadana, S. W., & Rahmania, R. (2024). Mengungkap tantangan dan dampak literasi keuangan syariah terhadap partisipasi masyarakat Aceh dalam perbankan syariah: Literatur review. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 160–167.
- Mariana, M., Ramadana, S. W., & Rahmانيar, R. (2024). Pertumbuhan ekonomi: Pengaruh pembiayaan dan aset tetap. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.59963/jpema.v6i1.289>
- Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). Transformasi bisnis dengan etika bisnis Islam: Keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 175–182. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Maulidi, M. R., et al. (2025). Digital transformation in local government: Enhancing financial transparency through the regional financial information system (SIKD). *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 54–66.
- Mir, M., Harun, H., & Sutiyono, W. (2018). Evaluating the implementation of a mandatory dual reporting system. *Australian Accounting Review*, 29(1), 80–94.
- Muhtar, M. (2022). Non-compliance to SAP in local governments in Indonesia. *Jurnal Penelitian*, 19(1), 11–22.
- Munawarah, H., & Diantimala, Y. (2016). Pengaruh motivasi, diskusi dalam reviu audit, kompleksitas tugas, dan tekanan waktu terhadap kinerja auditor (Studi pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 9(1), 33–44.
- Muradi, M., & Rusli, Z. (2013). Akuntabilitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(2), 189–200.
- Pasaribu, P. N. P., et al. (2024). Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 1–8.

- Polzer, T., Adhikari, P., Phuong, N., & Gårseth-Nesbakk, L. (2021). Adoption of IPSAS in emerging economies and low-income countries. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(3), 309–332.
- Putri, A. N., & Retnosari, R. (2023). Akuntansi sektor publik untuk mencegah fraud di era digital. *JURNAL MANEKSI*, 12(1), 99–108.
- Rahman, K., & Yulian, T. N. (2021). Determinan fraud prevention dengan akuntabilitas sebagai variabel mediating. *INOVASI*, 17(4), 828–839.
- Rajin, D., Džunić, M., & Radojević, T. (2019). Accrual accounting and financial management in the public sector in developing countries. *Ekonomika Preduzeća*, 67, 470–483.
- Ramadana, S. W., et al. (2023). Determinansi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., & Rahmania, R. (2023). Determinansi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Rinayanti, R., et al. (2025). Analisis penerapan process costing dalam industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas melalui hilirisasi. *JUTIN: Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 8(1), 543–549. <https://doi.org/10.31004/jutin.v8i1.40242>
- Seno, R. H. (2020). Strategi reformasi administrasi dan kepemimpinan. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 113–122.
- Syahputri, E. O., et al. (2025). Pengendalian biaya produksi dalam manufaktur: Teknik dan tantangan. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 30–41.
- Trisakti, F., et al. (2022). Transparansi dan kepentingan umum. *Deleted Journal*, 19(1), 29–35.
- Zahrani, M., et al. (2025). Concept and methodology of job order costing theory and practice. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 79–90.